

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perusahaan atau instansi pemerintah memiliki sistem pembayaran pembiayaan yang bermacam-macam. Pembiayaan memiliki dua macam yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan pemerintah, sistem pembayaran pembiayaan telah ditetapkan dan harus dijalankan agar operasional dalam perusahaan atau instansi pemerintah dapat bertahan dan berjalan dengan baik.

Salah satu perusahaan atau instansi pemerintah yang memiliki sistem pembayaran pembiayaan yaitu Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur. Pada bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi (PPI) di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur memiliki bermacam-macam sistem pembayaran pembiayaan. Salah satunya adalah sistem pembayaran pembiayaan perjalanan dinas. Pada bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi (PPI) di Biro Humas dan Protokol Povinsi Jawa Timur memiliki peran penting, yaitu melakukan pencatatan, penyesuaian, dan penggolongan pelaporan pembiayaan perjalanan dinas. Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi melakukan sitem pembayaran pembiayaan dan pengolahan data yang penting demi kelancaran operasional. Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur memiliki pedoman yang menjadi acuan dalam pembayaran pembiayaan

perjalanan dinas.

Sistem pembayaran pembiayaan perjalanan yang telah diterapkan di Biro Humas dan Protokol Povinsi Jawa Timur, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2008 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012. Pada peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 telah dijelaskan tata cara pelaksanaan dan pembayaran pembiayaan perjalanan dinas. Selain itu terdapat komponen biaya perjalanan dinas agar menjadi acuan mekanisme dalam melakukan perjalanan dinas. Pada peraturan tersebut di jelaskan cara pencairan dana yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah pelaksanaan perjalanan dinas.

Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur harus mematuhi peraturan Menteri Keuangan No 113/PMK.05/2012 dan No 164/PMK.05/2015 tentang tatacara pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri, agar pembiayaan perjalanan dinas bisa berjalan sesuai prosedur. Tetapi sering kali pembiayaan perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur di dapati tidak patuh. Seperti memberikan kwitansi maupun bukti yang sah bila telah melakukan perjalanan dinas melebihi dari 5 hari kerja setelah melakukan perjalanan dinas. Seharusnya prosedur kepatuhann pembiayaan perjalanan dinas dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012 dan No 164/PMK.05/2015, bukti atau kwitansi pengeluaran yang sah untuk pembiayaan perjalanan dinas diserahkan paling lambat 5 hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. Maka jika terjadi ketidak patuhan seperti itu

berdampak pada laporan pertanggungjawaban yang seharusnya bisa di biayai saat itu juga menjadi hutang dalam laporan tersebut. Sistem pembayaran pembiayaan perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Povinsi Jawa Timur sangatlah penting, karena sistem dan prosedur tersebut harus membuat laporan pertanggungjawaban yang mampu di pertanggungjawabkan. Sehingga bagian ini menjadi objek yang menarik untuk dilakukan analisis terhadap sistem dan prosedur pembiayaan perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Povinsi Jawa Timur. Hasilnya akan di ungkapkan dalam laporan tugas akhir yang berjudul: “**Analisis Kepatuhan Sistem Akuntansi Pembiayaan Perjalanan Dinas Pada Biro Humas Provinsi Jawa Timur**”.

## 1.2. Penjelasan Judul

Adapun penjelasan judul dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### **Analisis**

Sebuah kajian yang dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk meneliti sesuatu secara mendalam.

### **Kepatuhan**

Mengikuti sesuatu sesuai dengan hukum atau standart yang telah ditetapkan.

### **Sistem Akuntansi**

Suatu prosedur pencatatan yang melalui proses jurnalisisasi, serta menetapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang ada.

### **Pembiayaan**

Pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan

dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.

### **Perjalanan Dinas**

Perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan.

### **Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur**

Suatu bagian dalam instansi pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat maupun pegawai pemerintahan.

#### **1.3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan prosedur perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana komponen biaya dalam perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana penyajian laporan pertanggungjawaban pembayaran di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana permasalahan dan mengatasi permasalahan jika terjadi ketidakpatuhan dalam pembiayaan perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah

1. Agar mengetahui komponen biaya pembiayaan perjalanan dinas di Biro

Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur.

2. Agar mengetahui sistem dan prosedur pembayaran pembiayaan perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur.
3. Agar mengetahui laporan pertanggungjawaban pembiayaan perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur.
4. Agar mengetahui apakah di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur telah patuh sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012.

#### 1.5. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

##### 1. **Bagi STIE Perbanas Surabaya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan masukan kepada para pembaca.

##### 2. **Bagi Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi, dan memberikan kontribusi yang positif dalam hal kepatuhan sistem akuntansi pembiayaan perjalanan dinas sehingga dapat meningkatkan kinerja kearah yang lebih baik.

##### 3. **Bagi Penulis Selanjutnya**

Sebagai tambahan pengetahuan terutama lingkungan Perguruan Tinggi sebagai bahan bacaan untuk memperluas terapan dari pengetahuan yang dipelajari

dibantu kuliah.

### **1.6. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi/Studi Lapangan**

Melihat dan melakukan pengamatan langsung mengenai sistem akuntansi pembiayaan perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur. Dengan metode ini Mahasiswa dapat memperoleh data melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap hal-hal yang diteliti.

#### **2. Wawancara**

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait di Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan contoh daftar pertanyaan:

- a. Bagaimana contoh bukti-bukti yang sah dalam perjalanan dinas dan laporan pertanggungjawaban pembiayaan perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Provisnsi Jawa Timur?
- b. Bagaimana permasalahan dan mengatasi permasalahan jika terjadi ketidakpatuhan dalam pembiayaan perjalanan dinas di Biro Humas dan Protokol Provisnsi Jawa Timur?

#### **3. Dokumentasi**

Metode dan pengumpulan data yang diperoleh dengan mengumpulkan data-data seperti bukti perjalanan dinas, nota, kwitansi yang sah sesuai dengan Peraturan.